

# PERSEPSI PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP ACCOUNTING FRAUD TENDENCY (Studi Empiris di Kabupaten Grobogan)

# **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Febri Mustikawati
NIM 7211413141

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 25 April 2017

Pembimbing I

Kiswanto, S.E., M.Si.

NIP. 198309012008121002

Pembimbing II

Henny Murtini, S.E, M.Si

NIP.197603172008122001

Mengetahui,

Cettra Jurusan Akuntansi

ii

NIP. 196206231989011001

# PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 18 Mei 2017

Penguji I

Drs. Asrori, M.S.

NIP. 196005051986011001

Penguji II

Kiswanto, S.E, M.Si

NIP. 198309012008121002

Penguji III

Henny Murtini, S.E, M.Si

NIP.197603172008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Wahyono, M.N.

NIP.195601031983121001

# **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: Febri Mustikawati

: 7211413141

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 7 Febuari 1995

: Welahan Tambakselo RT 01/ RW 08 Kec. Wirosari

Kab. Grobogan, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sadan, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah sarkan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2017

Febri Mustikawati

NIM 7211413141

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# Motto

Aku hanya memiliki semangat dan mimpi, jadi jangan sampai aku kehilangan semangat untuk meraih mimpi (Penulis)

### Persembahan

- Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil, ini janji saya untuk dapat terus belajar
- 2. Andi Susilo, seorang kakak yang selalu menjadi panutan
- 3. Taman Baca Golek Ilmu yang selalu menginspirasi dan memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
- 4. Silvi, Tika, Jariyah, Mey, Ika, Dian, Evi, Mendi, Titin dan pengurus FOKUS 2016
- 5. Sahabat dekat saya Selvi, Wiwin, Dita, Ayu, Nining, Yunda, dan Desi
- 6. Nia, Nur, Isti, Ratna, Riski, Siti, dan penghuni Kost Panji Sukma 1 yang selalu menghibur
- 7. Nani Fitriani, adek yang selalu membantu dan menghibur
- 8. Teman-teman Konsentrasi Audit dan Akuntansi C 2013
- 9. Teman-teman KKN Desa Kembangsari

### **SARI**

**Mustikawati, Febri.** 2017. "Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap Accounting Fraud Tendency (Studi Empiris di Kabupaten Grobogan)". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Kiswanto S.E., M.Si. II. Henny Murtini, S.E.M.Si.

Kata kunci: Accounting Fraud Tendency, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Budaya Etis Organisasi.

Provinsi Jawa Tengah masuk dalam tiga provinsi tertinggi dengan tingkat korupsi yang melibatkan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelola keuangan desa terhadap pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya etis organisasi terhadap *accounting fraud tendency*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pengelola keuangan desa di Kabupaten Grobogan selaku pengelola dan penanggung jawab dalam penyusunan pelaporan keuangan desa. Penentuan sampel menggunakan teknik cluster sertified random sampel dan terpilih 15 desa dengan 91 responden yang mewakili populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS Versi 21.

Hasil pengujian menunjukan bahwa keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap accounting fraud tendency. Kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap accounting fraud tendency. Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya etis organisasi secara bersamasama berpengaruh terhadap accounting fraud tendency.

Saran untuk pengelola keuangan desa di Kabupaten Grobogan adalah agar dapat mempertahakan keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi sehingga pengendalian internal dapat tetap berjalan efektif dan taat terhadap aturan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktorfaktor yang mempengaruhi *accounting fraud tendency* dengan mengembangkan teori selain *diamond theory*.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### **ABSTRACT**

**Mustikawati, Febri**. 2017. "Village Financial Manager Perception towards Accounting Fraud Tendency (Empirical Study in Grobogan)". Final Project. Department of Accounting. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Kiswanto S.E., M.Si. Co-Supervisor: Henny Murtini, S.E., M.Si.

Keywords: Accounting Fraud Tendency, Internal Control Effectiveness, Compensation Suitability, Compliance to Accounting Regulation, Ethical Organization Culture

Central Java is in the big three of provinces with the highest levels of village officer corruption. This study aims to find the effect of village financial managers towards the effect of internal control effectiveness, compensation suitability, compliance to accounting regulation and ethical organization culture to accounting fraud tendency.

This study is conducted to find the perception of village financial managers in Grobogan who in charge financial reporting preparation of the village. Research sample is obtained using cluster certified random sample. There are 15 villages with 91 respondents representing the population. A questionnaire is distributed to collect data. In addition, the data is analyzed multiple regression analysis with SPSS Version 21.

The results show that internal control effectiveness and compliance to accounting regulation have significant and negative impact on accounting fraud tendency. In the other side, compensation suitability and ethical organization culture do not affect accounting fraud tendency. Nevertheless, it is empirically proven that simultaneously internal control effectiveness, compensation suitability, compliance to accounting regulation and ethical organization culture affect accounting fraud tendency.

Based on the analysis, it is important for village financial manager to maintain internal control effectiveness and compliance to accounting regulation as it can reduce accounting fraud tendency. Meanwhile, future research is expected to elaborate accounting fraud tendency factors by using other theory besides diamond theory.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salam dan shalawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerang kalbu. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Studi Empiris di Kabupaten Grobogan)" yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran, dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
- 2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- 3. Drs. Fachrurro<mark>zie,M.Si., Ketua Jurusan Ak</mark>untansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- 4. Drs. Asrori, M.S., penguji yang telah memberikan evaluasi serta bimbingan agar skripsi ini menjadi lebih baik
- 5. Kiswanto S.E.,M.Si., pembimbing dan dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai

- 6. Henny Murtini,S.E,M.Si., pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai
- 7. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi
- 8. Seluruh responden Pemerintah Desa Kabupaten Grobogan yang bersedia meluangkan waktu demi berjalannya penelitian ini
- 9. Kedua orang tua dan keluarga yang telah menjadi penyumbang terbesar selama studi baik dalam materil maupun non materil
- 10. Teman-teman Jurusan Akuntansi yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melaksanakan studi di Universitas Negeri Semarang
- 11. Teman-teman Rombel Akuntansi C 2013 dan Konsentrasi Audit selaku teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir
- 12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan berguna bagi perkembangan studi akuntansi.

Semarang, April 2017

# UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

# DAFTAR PUSTAKA

| HALAMAN JUDUL   | i    |
|---|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING                                  | ii   |
| PENGESAHAN KELULUSAN                                    |      |
| PERNYATAAN  | . iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN                                   | . v  |
| SARI  | . vi |
| ABSTRACK  | vii  |
| PRAKATA   | viii |
| DAFTAR ISI  | X    |
| DAFTAR TABEL  | xiv  |
| DAFTAR GAMBAR   | XV   |
| DAFTAR LAMPIRAN   | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN                                       | 1    |
| 1.1. Latar Belakang                                     | 1    |
| 1.2. Identifika <mark>si M</mark> as <mark>ala</mark> h |      |
| 1.3. Cakupan Masala <mark>h</mark>                      | 15   |
| 1.4. Perumusa <mark>n M</mark> as <mark>ala</mark> h    | 16   |
| 1.5. Tujuan Pen <mark>eliti</mark> an                   | 17   |
| 1.6. Kegunaan Pe <mark>neliti</mark> an                 | 17   |
| 1.7. Orisinalitas Penelitian                            | 18   |
| BAB II KAJIAN PUTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN           | 20   |
| 2.1. Grand Theory                                       | 20   |
| 2.1.1 Faud Diamond Theory                               | 20   |
| 2.1.1.1 Tekanan (Pressure)                              | 22   |
| 2.1.1.2 Kesempatan (Opportunity)                        | 23   |
| 2.1.1.3 Rasionalisasi (Rationalization)                 | 24   |
| 2.1.1.4 Kemampuan (Capability)                          | 24   |
| 2.1.2 Teori Atribusi                                    | 25   |

|   | 2.2. Kajian Variabel Penelitian   | 27 |
|---|---|----|
|   | 2.2.1 Accounting Fraud Tendency   | 27 |
|   | 2.2.2 Kesesuaian Kompensasi   | 32 |
|   | 2.2.3 Keefekt <mark>i</mark> fan Pengenda <mark>lian</mark> Internal  | 34 |
|   | 2.2.4 Budaya Etis Organis <mark>asi</mark>  | 38 |
|   | 2.2. <mark>5 Ketaata</mark> n Aturan Ak <mark>u</mark> ntansi   | 40 |
|   | 2.3. Kajian Penelitian Terdahulu  |    |
|   | 2.4. Kerangka Berpikir.   | 46 |
|   | 2.4.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Accounting Fraud  |    |
|   | Tendency  | 46 |
|   | 2.4.2 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap <i>Accountin</i>  | g  |
|   | Fraud Tendency  | 48 |
|   | 2.4.3 Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Accounting Fraud   |    |
|   | Tendency  | 49 |
|   | 2.4.4 Pengaruh <mark>K</mark> et <mark>aat</mark> an <mark>A</mark> turan <mark>A</mark> kuntansi terhadap <i>Accounting Frau</i> | d  |
|   | Tendency  |    |
|   | 2.5. Hipotesis Penelitian   | 52 |
| B | AB III METO <mark>DE PENE</mark> LITIAN   | 53 |
|   | 3.1. Jenis dan Desain Penelitian  | 53 |
|   | 3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  | 53 |
|   | 3.2.1 Populasi  | 53 |
|   | 3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  | 53 |
|   | 3.3. Variabel Penelitian  | 57 |
|   | 3.3.1 Accounting Fraud Tendency   | 58 |
|   | 3.3.2 Kesesuaian Kompensasi   | 58 |
|   | 3.3.3 Keefektifan Pengendalian Internal   | 59 |
|   | 3.3.4 Budaya Etis Organisasi  | 60 |
|   | 3.3.5 Ketaatan Aturan Akuntansi   | 60 |
|   | 3.4. Teknik Pengambilan Data  | 61 |
|   | 3.5. Metode Analisis Data   | 62 |
|   | 3.5.1 Statistik Deskriptif  | 62 |

| 3.5.1.1 Statistik Deskriptif Responden                         | 62 |
|--|----|
| 3.5.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian                | 62 |
| 3.5.2 Pengujian Kualitas Data                                  | 66 |
| 3.5.2.1 Pengujian Reliabilitas                                 | 67 |
| 3.5.2.2 Pengujian Val <mark>iditas</mark>                      | 67 |
| 3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik                                  | 68 |
| 3.5.3.1 Pengujian Normalitas                                   | 68 |
| 3.5.3.2 Pengujian Multikoloniaritas                            | 68 |
| 3.5.3.3 Pengujian Heteroskedastisitas                          | 69 |
| 3.5.4 Analisis Regresi Berganda                                | 70 |
| 3.5.5 Pengujian Hipotesis                                      | 70 |
| 3.5.6.1 Pengujian Simultan (Uji F)                             | 70 |
| 3.5.6.2 Pengujian Parsial (Uji t)                              | 71 |
| 3.5.6.3 Koefisien Determinasi                                  | 72 |
| BAB IV HASIL DAN <mark>PEMB</mark> AHASAN                      | 74 |
| 4.1 Hasil Penelitian   | 74 |
| 4.1.1 Des <mark>krip</mark> tif <mark>Objek Pene</mark> litian | 74 |
| 4.1.2 Des <mark>kript</mark> if <mark>Re</mark> sponden        | 76 |
| 4.1.3 Desk <mark>ripti</mark> f Variabel Penelitian            | 78 |
| 4.1.3.1 Keefektifan Pengendalian Internal                      | 79 |
| 4.1.3.2 Kesesuaian Kompensasi                                  | 81 |
| 4.1.3.3 Ketaatan Aturan Akuntansi                              | 84 |
| 4.1.3.4 Budaya Etis Organisasi                                 | 87 |
| 4.1.3.5 Accounting Fraud Tendency                              | 89 |
| 4.2 Pengujian Kualitas Data                                    |    |
| 4.2.1 Pengujian Reliabilitas                                   | 92 |
| 4.2.2 Pengujia Validitas                                       | 92 |
| 4.3 Pengujian Asumsi Klasik                                    |    |
| 4.3.1 Pengujian Normalitas                                     | 94 |
| 4.3.2 Pengujian Multikoloniaritas                              | 96 |
| 4.3.3 Penguijan Heteroskedastisitas                            | 97 |

| 4.4 Analisis Regresi Berganda  |
|--|
| 4.5 Pengujian Hipotesis Penelitian                                   |
| 4.5.1 Pengujian Simultan (Uji F)                                     |
| 4.5.2 Pengujian Parsial (Uji t)                                      |
| 4.5.3 Koefisien Determinasi (R)                                      |
| 4.6 Pembahasan   |
| 4.6.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Accounting Fraud       |
| Tendency   |
| 4.6.2 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Accounting |
| Fraud Tendency   |
| 4.6.3 Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Accounting Fraud      |
| Tendency   |
| 4.6.4 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Accounting Fraud   |
| Tendency   |
| BAB V PENUTUP. 113   |
|  |
| 5.1 Simpulan 113   |
| 5.2 Saran  |
| DAFTAR PUSTAKA117  |
| LAMPIRAN 123   |



# **DAFTAR TABEL**

| Tabel 2.1  | Penelitian Terdahulu  | 43 |
|------------|---|----|
| Tabel 3.1  | Pembagian Klaster Wilayah   | 55 |
| Tabel 3.2  | Perhitungan Sampling  | 56 |
| Tabel 3.3  | Kategori accounting fraud tendency  | 63 |
| Tabel 3.4  | Kategori Keefektifan Pengendalian Internal  | 64 |
| Tabel 3.5  | Kategori Kesesuaian Kompensasi  | 65 |
| Tabel 3.6  | Kategori Ketaatan Aturan Akuntansi  | 65 |
| Tabel 3.7  | Kategori Budaya Etis Organisasi   | 66 |
| Tabel 4.1  | Daftar Pendistribusian Kuesioner  | 75 |
| Tabel 4.2  | Tingkat Penyebaran Kuesioner  | 75 |
| Tabel 4.3  | Identitas Responden   | 76 |
| Tabel 4.4  | Hasil Statistik Deskriptif  | 79 |
| Tabel 4.5  | Distrib <mark>usi Fre</mark> kuensi Indikator Keefektifan <mark>Pen</mark> gendalian Internal | 80 |
| Tabel 4.6  | Distribusi Frekuensi Keefektifan Pengendalian Internal  | 81 |
| Tabel 4.7  | Distribusi Frekuensi Indikator Kesesuaian Kompensasi  | 82 |
| Tabel 4.8  | Distribusi Frekuensi Kesesuaian Kompensasi  | 83 |
| Tabel 4.9  | Distribusi Frekuensi Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi                                      | 85 |
| Tabel 4.10 | Distribusi Frekuensi Ketaatan Aturan Akuntansi  | 86 |
| Tabel 4.11 | Distribusi Frekuensi Indikator Budaya Etis Organisasi   | 88 |
| Tabel 4.12 | Distribusi Frekuensi Budaya Etis Organisasi   | 89 |
| Tabel 4.13 | Distribusi Frekuensi Indikator Accounting Fraud Tendency                                      | 90 |
| Tabel 4 14 | Distribusi Frekuensi Accounting Fraud Tondoncy  | 91 |

| Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas            | 92  |
|--|-----|
| Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas               | 93  |
| Tabel 4.17 Hasil Pengujian Normalitas        | 95  |
| Tabel 4.18 Hasil Pengujian Multikolonieritas | 96  |
| Tabel 4.19 Hasil Uji Park                    | 98  |
| Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Berganda   | 99  |
| Tabel 4.21 Hasil Uji F                       | 101 |
| Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi   | 103 |
| Tabel 4.23 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis  | 104 |



# **DAFTAR GAMBAR**

| Gambar 2.1 | Fraud Diamond   | 21 |
|------------|---|----|
| Gambar 2.2 | Fraud Tree  | 30 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Berpikir                                       | 52 |
| Gambar 4.1 | Ha <mark>sil Pe</mark> ngujian Normalitas Grafik P-Plot | 95 |
| Gambar 4.2 | Scatterplot Uji Heteroskedastisitas                     | 97 |



# **DAFTAR LAMPIRAN**

| Lampiran 1                | Data Mentah Jawaban Responden         | 124   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|
| Lampiran 2                | Pengujian Instrumen                   | 141   |
| Lampiran 3                | Pengujian Validitas                   | . 155 |
| Lampiran 4                | Pe <mark>nguji</mark> an Reliabilitas | . 165 |
| Lampiran 5                | Analisis Deskriptif Variabel          | . 169 |
| La <mark>mpi</mark> ran 6 | Pengujian Normalitas                  | 172   |
| L <mark>ampiran</mark> 7  | Pengujian Multikoloniaritas           | 174   |
| Lampiran 8                | Pengujian Heteroskedastisitas         | 175   |
| Lampiran 9                | Pengujian Regresi Berganda            | 176   |
| Lampiran 10               | Instrumen Penelitian                  | 177   |
| Lampiran 11               | Surat Ijin Penelitian.                | 186   |



### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Accounting fraud tendency atau kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh perilaku etis masing-masing akuntan. Kecurangan akuntansi ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau penyembunyian informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi. Thoyibatun (2009) menyatakan bahwa accounting fraud tendency tergolong menjadi berbagai bentuk, seperti kecenderungan akan korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecenderungan pengungkapan laporan keuangan yang tidak sebenarnya.

Accounting fraud tendency dapat terjadi di sektor publik maupun swasta dengan berbagai jenis kejahatannya. Sulastri dan Simanjuntak (2014) menjelaskan bahwa accounting fraud tendency lebih banyak terjadi di instansi pemerintah dikarenakan organisasi ini memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Accounting fraud tendency diharapkan dapat diminimalisir sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak terdapat penyalahgunaan aset, dan korupsi. Pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya masih terjadi banyak kecurangan (fraud) yang terjadi di sektor pemerintah.

Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang untuk pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan mensejahterakan masyarakat desa. Setiap desa memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah berfungsi agar setiap desa dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan dapat melaksanakan pemerintah daerah agar dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Setiap desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan. Dana yang diterima desa dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan nasional antara wilayah kota dan desa, serta mensejahterakan masyarakat miskin yang mayoritas terdapat di desa. Tujuan ini tidak sejalan dengan keadaan dilapangan, hal ini ditunjukan dengan banyak kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam <u>mediaindonesia.com</u> menyatakan bahwa pada semester I tahun 2016 praktik korupsi yang terjadi mencapai 210 kasus. Praktik korupsi tersebut terdiri dari 205 kasus yang terjadi pada tingkat daerah dan 5 kasus terjadi di tingkat nasional. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat daerah yang menjadi tersangka mulai dari gubenur hingga ditingkat yang paling rendah yaitu pemerintah desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tanggal 9 Desember 2016 juga melansir data korupsi yang terjadi di desa dari tahun 2010-2015 tercatat 133 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 205 miliar rupiah. Korupsi ini dilakukan oleh 122 kepala desa, 26 orang aparatur desa, 14 orang pelaksanaan kegiatan ekonomi desa, 11 orang dari orang

lain, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa tindak pidana kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa paling sering terjadi di Jawa Timur (36 kasus), serta Jawa Tengah dan Jawa Barat (masing-masing 16 kasus). Data Kementerian Keuangan tahun 2016 menunjukan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang mendapatkan anggaran dana desa terbesar di Indonesia, akan tetapi data dari ICW menunjukan bahwa Jawa Tengah menduduki posisi kedua terkait kasus korupsi di desa. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak terjadi penyelewengan anggaran dana desa dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Jawa Tengah.

Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang melibatkan Kepala Desa di Desa Pahesan dan Desa Tegalsumur. Informasi pada *infokorupsi.com*, menunjukan bahwa Kepala Desa Pahesan divonis satu tahun penjara dan denda lima puluh juta lima ratus rupiah. Sudjadi (Kepala Desa Pahesan) melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang terhimpun dari beberapa kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sudjadi bertindak sebagai kepala desa sekaligus pihak pelaksana kegiatan dari bantuan keuangan fisik dan non fisik. Berita dalam suara merdeka juga menyatakan bahwa Kepala Desa Tegalsumur Kecamatan Brati Masyudi ditahan penyidik karena melakukan tindak pidana kasus korupsi dana bantuan dari APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp52.850.000 pada tahun 2014. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

diharapkan dapat mengembangkan desa dan mensejahterakan keluarga miskin dengan penyaluran dana desa yang cukup besar.

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa prioritas pembangunan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui prioritas arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Jika dalam penyaluran dana desa tidak tepat sasaran dan terdapat penyelewengan dana dengan tindakan korupsi, maka tujuan dari dana desa tidak dapat terwujud sehingga pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat meningkat.

Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di desa yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan kajian sistem pengelolaan keuangan desa sejak bulan januari 2015 dan menemukan 14 temuan pada empat aspek yang di kelompokan berdasarkan aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukan bahwa accounting fraud tendency dapat terjadi di sektor swasta atau pemerintahan termasuk desa. Lou, et al. (2009) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut: tekanan yang diberikan oleh perusahaan atau dari pengawas, presentase transaksi yang kompleks, keraguan atas integritas manajer perusahaan, dan kemunduran hubungan antara perusahaan dan

pengawas. Mustikasari (2013) menyatakan bahwa kasus kecurangan tidak hanya melibatkan seorang yang mempunyai jabatan tinggi, akan tetapi seseorang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi dilingkungan pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Melihat dampak yang ditimbulkan dari *accounting fraud tendency* yang dapat merugikan negara, maka pemerintah desa harus melakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*. Kyalo, et al. (2014) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan tidak hanya mengadopsi praktik yang bagus, tetapi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pembagian tugas pemerintah pusat menentukan peraturan dan pemerintah daerah melaksanakan peraturan dengan baik.

Accounting fraud tendency pada pemerintahan tidak hanya terfokus untuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aset dan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai merupakan bentuk accounting fraud tendency. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan beberapa temuan hasil pemeriksaan terkait penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada tahun 2013. Temuan lain yang ditemukan oleh BPK pada tahun 2014 adalah pelaporan penjualan lelangan bekas Bondo Desa yang tidak menggambarkan subtansi yang sebenarnya.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan selama tahun 2011 sampai 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan pada peraturan. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan

tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbaikan penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Grobogan serta sistem pengendalian internal dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang ada. Perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya accounting fraud tendency pada pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Wilopo (2006) menyatakan bahwa *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir dengan keefektifan pemberian kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen, dan perilaku tidak etis. Thoyibatun (2009) menyatakan bahwa *accounting fraud tendency* dipengaruhi oleh perilaku tidak etis, keefektifan pengendalian internal dan sistem kompensasi. Najahningrum (2013) melakukan penelitian terkait *fraud* dengan variabel yang mempengaruhi yaitu penegakan peraturan, pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi.

Penelitian ini menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi yang dapat meminimalisir terjadinya accounting fraud tendency. Penentuan variabel tersebut berdasarkan fraud diamond theory yang sering digunakan untuk menjelaskan accounting fraud tendency. Teori fraud diamond merupakan pengembangan dari fraud triangle theory yang mendapatkan penambahan elemen kemampuan. Teori ini terdiri atas empat elemen yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization) dan kemampuan

(capability). Seseorang melakukan kecurangan karena adanya tekanan yang dirasakan, kemudian melihat kesempatan yang memberikan peluang untuk melakukan sebuah kecurangan tersebut, dan selanjutnya seseorang akan merasionalisasikan bahwa apa yang dia lakukan bukan merupakan sebuah kecurangan. Fraud atau kecurangan sendiri dapat terjadi karena kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah kecurangan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah kecurangan, maka kecurangan tidak mungkin terjadi.

Accounting fraud tendency dapat diminimalisir dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pegawai, melakukan keefektifan pengendalian internal, membentuk budaya etis pada organisasi, dan penerapan ketaatan aturan akuntansi. Hal ini merupakan pengembangan dari fraud diamond theory. Elemen tekanan (pressure) ditunjukan dengan kesesuaian kompensasi, kesempatan (opportunity) ditunjukan dengan keefektifan pengendalian internal, rasionalisasi (rationalization) ditunjukan dengan budaya etis organisasi, dan kemampuan (capability) ditunjukan dengan ketaatan aturan akuntansi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pengelola keuangan desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan desa. Persepsi merupakan bagaimana seseorang melihat atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia atau secara definisi formal dijelaskan sebagai proses seseorang memilih, berusaha, dan menginterprestasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti (Lubis, 2014:93). Seseorang akan melakukan tindakan sesuai dengan persepsinya, sehingga persepsi

sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan berperilaku Sulastri dan Simanjuntak (2014). Pengelola keuangan akan cenderung melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang dipersepsikan. Pengelola keuangan desa terdiri dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan dan penanggung jawab pengelolaan keuangan desa serta dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi. Faktor-faktor *accounting fraud tendency* dalam penelitian ini terdiri dari kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi.

Kompensasi merupakan kontra prestasi atau penghargaan yang diterima seorang pegawai atas kinerja yang telah dilakukan kepada organisasi. Kesesuaian kompensasi yang diterima oleh aparat pemerintah desa akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan *accounting fraud tendency*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian kedelapan pasal 66 menjelaskan terkait penghasilan pemerintah desa. Semenjak adanya dana desa, setiap kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, serta penerimaan lainnya setiap bulan. Pemberian kompensasi untuk kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Kompensasi untuk perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Peraturan tentang pemberian kompensasi yang diterima oleh pemerintah desa menunjukan bahwa kesejahteraan pegawai desa mulai diperhatikan oleh negara dengan harapan dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada

masyarakat desa. Sulastri dan Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa seseorang yang merasa kompensasi yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan maka akan cenderung tidak melakukan sebuah kecurangan (*fraud*). Kompensasi yang diterima secara sesuai akan membuat seseorang merasa puas dengan pekerjaannya dan tidak melakukan kecurangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Simanjuntak (2014) serta Thoyibatun (2009) yang menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency*.

Pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi. Salah satu upaya untuk meminimalisir tindakan kecurangan adalah dengan peningkatan efektifitas sistem pengendalian internal pada suatu organisasi (Wilopo, 2006). Sistem pengendalian internal diimplementasikan pada suatu organisasi melalui berbagai kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai dan untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya *eksposur* atau ancaman-ancaman keamanan informasi (Thoyibatun, 2012).

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan ini merupakan bentuk efektivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaran sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa Sitem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi.

Jika sistem pengendalian internal yang ada di pemerintah desa dapat diterapkan dengan baik, maka peluang terjadinya *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2012) yang menjelaskan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin efektif pengendalian internal pada suatu organisasi maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat ditekan.

Budaya etis organisasi pada pemerintah desa dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya *accounting fraud tendency*. Pristiyanti (2012) budaya etis organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu

dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi bersangkutan. Pemerintah desa merupakan organisasi yang kental akan budaya dan kearifan lokal. Berbeda dengan organisasi lain atau pemerintah daerah yang lain.

Budaya yang baik dalam organisasi akan menciptakan perilaku dalam diri seorang anggota organisasi tersebut. Apabila dalam suatu organisasi kecurangan merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi maka setiap orang dalam organisasi tersebut akan cenderung melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini didukung penelitian dari Sulistiyowati (2007) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan akuntansi.

Pemberian kesesuaian kompensasi, peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal, dan pembentukan budaya etis organisasi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya fraud, selain hal tersebut faktor yang dirasa dapat mempengaruhi accounting fraud tendency adalah ketaatan aturan akuntansi. Thoyibatun (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan accounting fraud tendency atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri. Penelitian dari Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap accounting fraud tendency.

Pelaporan keuangan dan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur perangkat desa. Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa pengelola keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif dan efisien, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelola keuangan desa dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan tata kelola keuangan desa diharapkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada untuk mencegah terjadi *accounting fraud tendency* yang mungkin terjadi.

Penelusuran riset sebelumnya menjelaskan bahwa accounting fraud tendency dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi. Thoyibatun (2009) melakukan penelitian terhadap Perguruan Tinggi yang berada di Jawa Timur. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal dan sistem kompensasi terhadap perilaku tidak etis dan accounting fraud tendency. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal dan sistem

kompensasi pada Perguruan Tinggi di Jawa Timur berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency.

Thoyibatun (2012) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan *accounting fraud tendency* pada tahun 2012. Penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi se Jawa Timur dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Hasil penelitian menunjukan kesesuaian sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *accounting fraud tendency*.

Wilopo (2006) melakukan penelitian pada BUMN di Indonesia yang menyebutkan bahwa pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency, akan tetapi kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap accounting fraud tendency. Penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Sulastri dan Simanjuntak (2014) yang menunjukan bahwa keadilan kompensasi dan keefektifan pengendalin internal berpengaruh terhadap accounting fraud tendency, akan tetapi etika organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap accounting fraud tendency.

Kusumastuti dan Meiranto (2012) melakukan penelitian di perusahaan perbankan di Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *accounting fraud tendency*, keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *accounting fraud tendency*.

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009).

Paparan mengenai fenomena, research gap, dan dukungan teori yang dikemukakan diatas, menjadi latar belakang pengajuan riset ini. Memperhatikan penelitian terdahulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi accounting fraud tendency pada pemerintah daerah, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap Accounting Fraud Tendency (Studi Empiris di Kabupaten Grobogan)".

# 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan atas adanya masalah terkait dengan accounting fraud tendency. Fenomena accounting fraud tendency dalam bentuk korupsi masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk yang melibatkan kepala pemerintah daerah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa pada semester I tahun 2016 praktik korupsi mencapai 210 kasus yang terjadi ditingkat nasional dan daerah. Korupsi yang terjadi di tingkat desa dari tahun 2010-2015 mencapai 133 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 205 miliar. Kasus korupsi tersebut melibatkan 122 kepala desa, 26 aparat desa, 14 orang pelaksana kegiatan ekonomi, 11 orang dari orang lain, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan korupsi di desa paling sering terjadi di Jawa Timur sebanyak 36 kasus, serta Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 16 kasus. Korupsi yang melibatkan pemerintah desa juga terjadi di

Kabupaten Grobogan yaitu Desa Pahesan dan Desa Tegalsumur. Kepala Desa Pahesan divonis penjara satu tahun dan denda karena melakukan korupsi dana desa yang terhimpun dari beberapa kegiatan APBDes dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa Tegalsumur Kecamatan Brati juga melakukan tindak korupsi dana bantuan dari APBD Kabupaten Grobogan.

Penjelasan permasalahan di atas menimbulkan suatu pertanyaan terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya accounting fraud tendency di pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti, mengingat bahwa tindakan accounting fraud tendency dapat merugikan negara. Penyerapan anggaran APBN dan APBD tidak dapat terserap dengan semestinya karena penyelewengan anggaran berupa tindak korupsi. Pelaporan keuangan pemerintah yang tersaji juga tidak akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan serta terjadinya penyalahgunaan aset negara.

# 1.3 Cakupan Masalah

Latar belakang dan identifikasi masalah yang dijelaskan di atas perlu dibatasi topik permasalahan yaitu meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap accounting fraud tendency, yang akan dibatasi dengan beberapa variabel pengaruhnya. Variabel yang akan digunakan adalah kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian akan dilakukan di pemerintah desa karena mulai tahun 2014 pemerintah desa mendapatkan dana desa dengan dana yang cukup besar untuk

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi masih ditemui beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa .

Peneliti melakukan pembatasan wilayah penelitian dengan memilih pengelola keuangan desa di Kabupaten Grobogan, hal ini dikarenakan selama tahun 2011 sampai 2014 laporan keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ditemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini menunjukan bahwa terdapat perbaikan sistem penyusunan pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pembatasan waktu penelitian selama Februari sampai Maret 2017, dengan melakukan penelitian dibantu dengan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada pengelola keuangan desa di Kabupaten Grobogan.

# 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan cakupan masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *accounting* fraud tendency?

- b. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency?
- c. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *accounting* fraud tendency?
- d. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency?

# 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap accounting fraud tendency
- b. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap accounting fraud tendency
- c. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh budaya etis organisasi terhadap accounting fraud tendency
- d. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *accounting fraud tendency*

# 1.6 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis NEGERI SEMARANG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya tentang *accounting fraud tendency* pada pemerintah desa.

# b. Manfaat Praktis

- Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan guna memecahkan permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana teori yang didapatkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dunia praktik.
- 2. Bagi pemerintah desa, sebagai evaluasi terkait kesesuaian kompesasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi yang ada pada pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya accounting fraud tendency yang mungkin terjadi.
- 3. Bagi akademik, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap accounting fraud tendency.

# 1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa pembaruan yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Pembaruan dari penelitian ini adalah:

a. Teori yang digunakan adalah *fraud diamond theory*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) menggunakan teori keagenan yang bermaksud untuk memecahkan dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan, Kusumastuti dan Meiranto (2012) menggunakan teori atribusi yang menjelaskan bahwa keputusan atau

- perilaku pemimpin disebabkan oleh atribut penyebab, dan Pristiyanti (2012) menggunakan *fraud triangle theory* untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *accounting fraud tendency*.
- b. Penambahan variabel budaya etis organisasi, penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012), Wilopo (2006), Thoyibatun (2009), serta Kusumastuti dan Meiranto (2012) tidak ada yang menggunakan variabel budaya etis organisasi. Hal ini ditambahkan untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap *accounting fraud tendency*.
- c. Research Gap yang menunjukan bahwa hasil temuan dari penelitian terdahulu tidak konsisten, sehingga penelitian ini menggunakan konsep baru yang dikembangkan dari fraud diamond theory.
- d. Pembaruan lain dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Desa. Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap accounting fraud tendency pada Perusahaan swasta, BUMN/BUMD, Instansi pemerintah seperti SKPD dan Perguruan Tinggi.



#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

## 2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory)

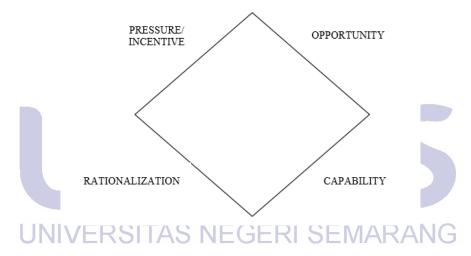
## 2.1.1 Fraud Diamond Theory

Fraud diamond theory merupakan teori yang menjelaskan sebuah pandangan baru terhadap sebuah kecurangan (fraud). Teori ini dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Fraud diamond theory merupakan suatu bentuk penyempurnaan teori fraud triangle theory oleh Cressey (1950). Penelitian yang dilakukan oleh Cressey (1950) menyatakan bahwa orang yang melakukan fraud ketika seseorang tersebut memiliki masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan secara bersama, sehingga masalah tersebut diselesaikan secara diamdiam dengan jabatan yang dimiliki dan berusaha untuk merasionalkan dengan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai untuk memegang aset tersebut dan menjadi pengguna aset tersebut. Pengembangan yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) adalah dengan memberikan tambahan elemen yang diyakini memiliki pengaruh signifikan yaitu Capability atau kemampuan.

Seseorang termotivasi untuk melakukan kecurangan karena memiliki tekanan atau dorongan yang dirasakan, baik tekanan dari diri sendiri maupun orang lain. Tekanan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat terjadi karena adanya kesempatan atau peluang yang dapat menimbulkan kecurangan karena lemahnya pengawasan. Selain itu, seseorang sebagai pelaku

kecurangan akan berusaha membenarkan tindakan kecurangan yang telah dilakukan bukan merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran atas aturan. Kecurangan dapat terjadi karena kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan itu sendiri.

Fraud diamond theory terdiri dari empat elemen yaitu tekanan (pressure), peluang (Opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability). Teori fraud diamond theory menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya empat hal yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan yang mendorong seseorang untuk berbuat kecurangan. Elemen tekanan ditunjukan dengan variabel kesesuaian kompensasi, elemen peluang ditunjukan dengan variabel keefektifan pengendalian internal, elemen rasionalisasi ditunjukan dengan variabel budaya etis organisasi, dan elemen kemampuan ditunjukan dengan variabel ketaatan aturan akuntansi.



**Gambar 2.1** *Fraud Diamond Theory* Sumber: Wolfe dan Hermanson (2004)

#### 2.1.1.1 Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan motivasi yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan karena adanya tekanan yang dirasakan. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan dari dalam diri seorang pelaku kecurangan maupun lingkungan sekitar. Zimbelman (2014:356) menyatakan bahwa elemen tekanan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

#### a. Tekanan keuangan

Tekanan keuangan merupakan tipe tekanan yang paling umum mendasari seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan keuangan umumnya berkaitan dengan kecurangan yang menguntungkan pelaku secara langsung. Hal ini terjadi karena adanya sifat serakah, keinginan untuk bergaya hidup di atas rata-rata orang pada umumnya, hutang yang menumpuk, kerugian keuangan secara pribadi, dan kebutuhan keuangan yang tidak terduga.

### b. Tekanan untuk melakukan kejahatan

Tekanan ini merupakan tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tindakan kecurangan tersebut dimotivasi karena dorongan atas kebiasaan untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal ini erat kaitannya dengan permasalahan dalam tekanan keuangan.

### c. Tekanan terkait pekerjaan

Tekanan terkait pekerjaan dapat ditimbulkan karena adanya faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan terhadap pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena sedikitnya pengakuan terhadap kinerja atas pekerjaan yang dilakukan, adanya perasaan tidak puas atas pekerjaan yang telah dilakukan,

perasaan takut akan kehilangan pekerjaan, keinginan untuk mendapatkan promosi pekerjaan, dan merasa dibayar tidak semestinya.

#### d. Tekanan lainnya

Tekanan lainnya dapat timbul karena adanya tekanan yang dirasakan dari sekitar seseorang sehingga mendorong untuk melakukan sebuah kecurangan. Hal ini dapat berupa keinginan seseorang agar terlihat sukses sehingga tidak mengutamakan kejujuran.

#### 2.1.1.2 Kesempatan (*Opportunity*)

Seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya kesempatan yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan merupakan keadaan yang mendukung dan menyediakan kemungkinan bagi dipilihnya tindakan *accounting fraud tendency* (Thoyibatun, 2009). Menurut Zimbelman (2014:360) ada sedikitnya enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan seseorang melakukan kecurangan dalam sebuah organisasi yaitu:

- a. Kurangnya pengendalian yang mencegah atau mendeteksi perilaku kecurangan
- b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja
- c. Kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap perilaku kecurangan
- d. Kurangnya akses terhadap informasi
- e. Pengabaian, sikap apatis, dan tidak adanya kapasitas yang sesuai
- f. Kurangnya upaya melakukan jejak audit

#### 2.1.1.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan pembenaran yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kecurangan bahwa perilaku mereka adalah benar dan tidak melanggar. Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan kecurangan yang dilakukan sebanding dengan risikonya. Rasionalisasi merupakan bagian *fraud triangle theory* yang paling sulit diukur.

#### 2.1.1.4 Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan merupakan sifat dan kemampuan seseorang yang diperlukan untuk menjadi pelaku yang tepat dalam melakukan kecurangan, dimana kecurangan tidak akan terjadi tanpa memiliki kemampuan. Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan sifat-sifat yang berkaitan dengan *capability* atau kemampuan yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu:

#### a. Posisi (*Position*/function)

Posisi atau fungsi yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan dalam melakukan sebuah kecurangan dengan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang muncul. Seseorang yang berada dalam posisi otoritas akan memiliki pengaruh yang lebih besar atas situasi tertentu atas lingkungannya.

## b. Kepintaran (Brain)

Pelaku yang melakukan kecurangan memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses yang berwenang untuk mengambil keuntungan terbesar.

## c. Ego (Convidence)

Seseorang yang melakukan kecurangan harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar dimana dia tidak akan dapat terdeteksi. Tipe kepribadian yang umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil disemua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai dirinya sendiri (*narsisme*).

#### d. Kemampuan dalam memaksa (Coercion skills)

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan sebuah kecurangan atau penipuan yang telah dilakukan. Seseorang dengan kepribadian yang persuasif dapat dengan mudah meyakinkan orang lain untuk dapat melakukan kecurangan secara bersama.

#### e. Kemampuan dalam berbohong (Effective lying)

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Kegiatan kecurangan yang dilakukan harus terhindar dari deteksi, dimana individu harus mampu berbohong untuk meyakinkan dan membuat cerita secara keseluruhan.

#### f. Pengendalian stres (*Immunity to Stress*)

Seseorang harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi menimbulkan stres.

#### 2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterprestasikan suatu keadaan, peristiwa, alasan, atau sebab perilaku yang dilakukan olehnya. Teori atribusi menyatakan bahwa

perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*Internal forces*) yaitu faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu atau seseorang seperti kemampuan dan usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan (Lubis, 2014: 90).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman reaksi seseorang atas peristiwa yang ada disekitar individu dengan mengetahui alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik dari masing-masing individu. Fritz Heider menjelaskan bahwa kekuatan internal (kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (keadaan lingkungan seperti aturan) bersama-sama menentukan perilaku seseorang. Penentuan penilaian setiap individu berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi (Robbins, 2015).

Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui persepsi atau penilaian pengelola keuangan desa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi accounting fraud tendency. Penelitian menggunakan teknik kuesioner untuk mengetahui persepsi pengelola keuangan desa atas kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi. Penilaian yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap accounting fraud tendency.

## 2.2 Kajian Variabel Penelitian

### 2.2.1 Accounting Fraud Tendency

Definisi kecurangan menurut Zimbelman (2014:7) yaitu:

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satusatunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.

Fraud atau kecurangan merupakan upaya penipuan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan untuk mengambil harta atau hak orang lain (Eliza, 2015). Fraud atau kecurangan terdiri dari segala macam yang dipikirkan dan yang selalu diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan atas suatu kebenaran, mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang dilakukan tidak wajar akan menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian (Sulastri dan Simanjuntak, 2014).

Penjelasan kecurangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan seseorang dengan cara tidak jujur ataupun licik yang dapat merugikan orang lain. Kecurangan berbeda dengan kesalahan, kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja sehingga merugikan pihak lain, sedangkan kesalahan terjadi karena ketidaksengajaan. Kecurangan dapat terjadi karena sifat ketidakjujuran dan

integritas yang lemah serta sifat egois yang dimiliki seseorang sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan (Wright, 2003).

Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi sebagai <mark>sa</mark>lah saji yan<mark>g tim</mark>bul dari ke<mark>cu</mark>rangan dalam pelaporan keuangan da<mark>n salah saji</mark> yang timbul dari perlakuan ti<mark>dak se</mark>me<mark>sti</mark>nya terhadap aset. Salah saji dari ke<mark>curangan d</mark>alam pelaporan keuangan merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan ke<mark>uangan dapat berupa tindakan</mark>: (a) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, (b) Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan, (c) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak se<mark>mes</mark>tinya terhadap aset berkaitan d<mark>eng</mark>an pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan aturan. Perlakuan kecurangan dapat berupa penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aset, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas.

Accounting fraud tendency dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sutherland dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih (white-collar crime) dapat berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi, penyuapan dalam bentuk uang atau komersial, penyuapan

dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan. Thoyibatun (2012) menjelaskan bahwa accounting fraud tendency merupakan tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, penyembunyian, dan penyamaran yang tidak semestinya dengan cara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan untuk mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak lain.

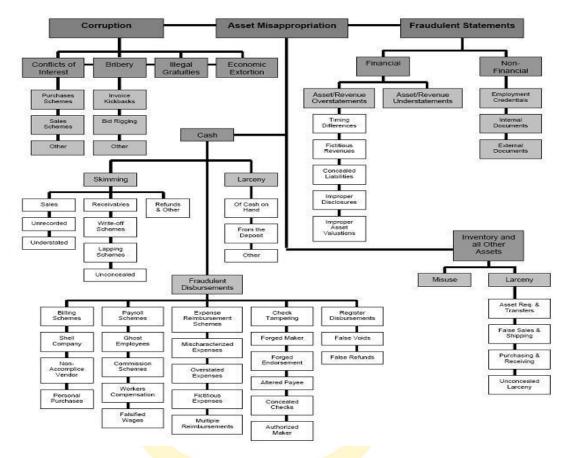
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (2014:195) menjelaskan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon kecurangan (fraud tree) menjelaskan jenis-jenis kecurangan dalam hubungan kerja dan cabang-cabangnya dalam sebuah organisasi. Jenis-jenis kecurangan terhadap organisasi dibagi menjadi tiga cabang yaitu korupsi (corruption), penyalahgunaan aset (asset misappropriation), dan laporan keuangan yang mengandung kecurangan (fraudulent statements).

#### a. Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Association of Certified Fraud Eximiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2014:195) menyatakan bahwa korupsi dapat dikelompokan menjadi empat skema yaitu:

1. Konflik kepentingan (*conflicts of interest*) yaitu konflik yang terjadi ketika pegawai, manajer, atau eksekutif yang memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi yang tidak dapat diungkapkan dalam suatu transaksi sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap

perusahaan. Konflik kepentingan dikelompokan menjadi tiga yaitu skema pembelian, skema penjualan, dan skema lainnya.



Uniform Occupational Fraud Classification System

Gambar 2.2 Fraud Tree

Sumber: Tuanakotta (2014:195)

- 2. Suap (*bribery*) yaitu pemberian, penawaran, penerimaan, atau permohonan sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Skema penyuapan secara umum terdiri dari dua kategori, yaitu skema *kickback* dan skema *bid-rigging*.
- 3. Pemberian ilegal (*illegal gratuities*), pemberian ilegal hampir sama dengan skema penyuapan, tetapi pemberian ilegal tidak memiliki tujuan

- untuk mempengaruhi keputusan bisnis tertentu melainkan hanya bentuk penghargaan karena membuat keputusan sesuai dengan keinginan.
- 4. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi merupakan lawan dari skema penyuapan.

  Penjual menawarkan atau memberikan suap kepada pembeli yang membeli produk dari perusahaan.
- b. Penyalahgunaan aset (asset misapproiation)

Penyalahgunaan aset adalah bentuk dari kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki aset secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pencurian kas dan pencurian atas persediaan dan aset lain.

- 1. Pencurian kas (cash fraud), pencurian kas dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu:
  - a) Pencurian (*larceny*) yaitu secara sengaja mengambil kas tanpa ijin dan bertentangan dengan prosedur yang ada
  - b) *Skimming* yaitu melakukan pemindahan kas sebelum dilakukan pencatatan kedalam sistem akuntansi
  - c) Kecurangan pengeluaran yaitu kecurangan yang dilakukan atas pengeluaran-pengeluaran secara curang
- 2. Pencurian atas persediaan dan aset lain, yaitu kecurangan berupa pencurian dan pemakaian aset untuk kepentingan pribadi atas persediaan atau aset lainnya.

Laporan keuangan yang mengandung kecurangan (fraudulent statement)
 Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor.

## 2.2.2 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi merupakan kontra prestasi yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja (Wibowo, 2014:289). Kompensasi dapat juga diartikan sebagai komponen biaya yang dibayarkan oleh organisasi kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dimana kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan bagi karyawan (Thoyibatun, 2012). Kompensasi juga dapat berupa semua pendapatan atau penghasilan yang berbentuk uang atau barang, baik diberikan secara langsung atau tidak langsung, dan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan.

Pemberian kompensasi dapat berupa kompensasi langsung maupun tidak langsung. Wibowo (2014:290) menyatakan kompensasi langsung dapat berbentuk gaji, upah, insentif, dan bonus. Kompensasi yang tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan. Sistem kompensasi pegawai memiliki peran penting karena merupakan pusat dari hubungan pekerjaan, sehingga hal ini menjadi penting bagi pegawai dan pemberi kerja (Irianto dkk, 2012).

Penghasilan yang diterima oleh pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana semenjak disahkannya Undang-Undang ini pemerintah desa mendapatkan kompensasi berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Kompensasi yang diberikan dapat juga berupa penghargaan atau *reward* yang dapat memberikan motivasi bagi karyawan. Pemberiaan kompensasi merupakan bentuk penghargaan perusahaan untuk karyawannya, Wibowo (2014:311) menjelaskan bahwa ada dua bentuk penghargaan yaitu:

## a. Penghargaan Ekstrinsik

Penghargaan ekstrinsik merupakan penghargaan yang diberikan kepada seorang pekerja dari lingkungannya. Penghargaan ekstrinsik dapat berupa penghargaan finansial, materiil, ataupun penghargaan sosial.

### 1. Penghargaan Finansial

Penghargaan finansial merupakan penghargaan yang diberikan oleh lingkungan kepada seorang karyawan yang diberikan dalam bentuk upah atau gaji dan jaminan sosial.

#### 2. Penghargaan Interpersonal

Penghargaan interpersonal yang diberikan dapat berupa penghargaan atas pengakuan terkait pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik.

#### 3. Promosi

Promosi diberikan oleh manajemen sebagai usaha mencocokan orang yang tepat dengan pekerjaannya.

### b. Penghargaan Intrinsik

Penghargaan intrinsik merupakan penghargaan yang berasal dari diri seorang pekerja itu sendiri yang terdiri dari tanggung jawab, tantangan, dan karakteristik lain yang merupakan bentuk dari umpan balik dari pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan intrinsik ini dapat berupa:

- 1. Penyelesaian pekerjaan
- 2. Prestasi
- 3. Otonomi
- 4. Pengembangan Pribadi

#### 2.2.3 Keefektifan Pengendalian Internal

Pengendalian intern dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) pada tahun 1992 dalam laporannya yang berjudul "*Internal Control-Integrated Framework*". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014:49) menyatakan bahwa mengacu pada sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO untuk sektor publik maka *General Accounting Office* (GAO) pada tahun 1999 mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

"Internal Control: a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personil, designed to provide reasonable assurance regarding the improvement of objectives in the following categories:

- a. Effectiveness and efficiency of operation,
- b. Reliability of financial reporting,
- c. Compliance with applicable laws and regulations"

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Pengedalian intern merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam berbagai kategori:

- a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku

Penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan ini merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Setiap pemerintah desa harus melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang SPIP adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan."

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri serta unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014) menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian intern dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan setiap pimpinan instansi dalam pemerintah untuk dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian memiliki sub unsur yang terdiri dari:

- 1. Penegakan integritas dan nilai etika
- 2. Komitmen terhadap kompetensi
- 3. Kepemimpinan yang kondusif
- 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
- b. Penilaian Risiko

Tahap penilaian risiko (*risk assessment*) dilakukan untuk dapat mengetahui risiko yang mungkin dihadapi oleh unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan dalam bentuk respon terhadap risiko (*mitigate*, *avoid*, *transfer*, *share*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan. Penilaian risiko terdiri dari empat sub unsur yaitu:

- 1. Penetapan tujuan instansi
- 2. Penetapan tujuan kegiatan

- 3. Indentifikasi risiko
- 4. Analisis risiko
- c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan suatu Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Unsur kegiatan pengendalian memiliki beberapa sub-unsur yang terdiri dari:

- 1. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2. Pembinaan sumber daya manusia
- 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4. Pengendalian fisik atas aset
- 5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- 6. Pemisahan fungsi
- 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
- d. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Sub unsur dari unsur informasi dan komunikasi adalah:

- 1. Sarana komunikasi
- 2. Manajemen sistem informasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang terakhir.

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### 2.2.4 Budaya Etis Organisasi

Budaya organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain (Robbins, 2015:355). Budaya organisasi memperlihatkan bagaimana karyawan memandang karakteristik dari budaya organisasi mereka. Nurjanah (2008) menjelaskan bahwa suatu budaya organisasi sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota

organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain.

Budaya etis organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan (Pristiyanti, 2012). Robbins (2015: 360) menyatakan bahwa budaya organisasi terdapat iklim kerja yang etis yaitu konsep kerja yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah ditempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam melakukan berbagai hal. Robbins (2015: 372) menjelaskan bahwa suatu budaya yang beretika dapat dibentuk para manajer dan karyawan dalam suatu organisasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### a. Menjadi pa<mark>nuta</mark>n yang terlihat

Seorang perangkat desa akan melihat tindakan dari kepala desa ataupun sekretaris desa sebagai patokan atas perilaku yang layak, sehingga diharapkan dapat memberikan panutan yang positif

### b. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika

Meminimalkan ketidakjelasan yang mungkin terjadi dalam organisasi dengan membagikan kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar organisasi dan aturan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh perangkat desa

- c. Menyediakan pelatihan yang beretika
  - Mengadakan seminar serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi, menjelaskan praktik-praktik yang diperbolehkan, dan dilema etik yang mungkin terjadi dalam organisasi
- d. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika
- e. Menyediakan mekanisme perlindungan

Pemberian mekanisme perlindungan etika membuat pekerja dapat membahas dilema-dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa takutan atau teguran

#### 2.2.5 Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan seorang akuntan atau pengelola keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi yang telah diatur. Thoyibatun (2012) menjelaskan ketaatan akuntansi merupakan sebuah kewajiban, karena jika laporan keuangan yang dibuat tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, maka keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan yang tidak dapat atau sulit ditelusuri oleh auditor. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa pengelola keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengelola keuangan dana desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif dan efisien,memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

#### a. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan disesuaikan dengan kewenangannya dan harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota setempat.

#### b. Pelaksanaan

Pemerintah desa melakukan pelaksanaan anggaran desa yang telah dirancang sebelumnya, dalam pelaksanaannya akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua transaksi yang terjadi harus

dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa, jika pemerintah desa belum memiliki pelayanan perbankan wilayah maka akan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

#### c. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan yang wajib dibuat oleh bendahara desa terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

## d. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala desa wajib:

- 1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
  Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir
- 2. Menyampaikan Laporan Penyelengga<mark>raa</mark>n Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- 4. Menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan

pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan desa digunakan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhannya terkait informasi keuangan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:17). Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi (Pradnyani, 2014). Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, dan standar teknis.

#### 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai accounting fraud tendency pada sektor pemerintahan diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

| <b>PENULIS</b> | JUDUL          | VARIABEL        | METODE  | TEMUAN       |
|----------------|----------------|-----------------|---------|--------------|
| Thoyibatu      | Analysing The  | -Perilaku tidak | Regresi | -PI=>(-) PTE |
| n              | Influence of   | etis (PTE)      | (SPSS)  | diterima     |
| (2012)         | Internal       | -Kecenderungan  |         | -PI=>(-) KKA |
|                | Control        | Kecurangan      |         | diterima     |
|                | Compliance     | Akuntansi       |         | -SK=>(-)PTE  |
| UNIV           | and CITAC      | (KKA)           | FMARA   | ditolak      |
| CIVIV          | Compensation   | -Sistem         |         | -SK=>(-) KKA |
|                | System Against | Kompensasi      |         | diterima     |
|                | Unethical      | (SK)            |         |              |
|                | Behavior And   | -Pemenuhan      |         |              |
|                | Accounting     | Pengendalian    |         |              |
|                | Fraud Tedency  | Internal (PI)   |         |              |

| PENULIS   | JUDUL                       | VARIABEL                    | METODE                    | TEMUAN                           |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Rae and   | Quality of                  | Incidence of                | Logistic                  | ICP Quality                      |
| Subramani | internal                    | Employee fraud,             | Regression                | memiliki efek                    |
| am (2008) | control                     | ICP Quality,                | and OLS                   | moderat antara                   |
| , ,       | procedures                  | Organizational              | multipple                 | organizational                   |
|           | 1                           | Justice                     | regression                | justice                          |
|           |                             | Perceptions,                |                           | perseptions                      |
|           | / 🔼                         | Corporate                   |                           | terhadap                         |
|           |                             | ethical                     |                           | employee fraud.                  |
| / /       |                             | Environment                 |                           | ICP Quality                      |
|           |                             | Risk                        |                           | secara signifikan                |
|           |                             | <i>Management</i>           |                           | dan positif                      |
|           |                             | Training,                   |                           | dip <mark>eng</mark> aruhi oleh  |
|           |                             | Internal Audit              |                           | co <mark>rpora</mark> te ethical |
|           |                             | <b>Act</b> ivities          |                           | environment risk                 |
|           |                             |                             |                           | management                       |
|           |                             |                             |                           | training, internal               |
|           |                             |                             |                           | audit activities                 |
| Wilopo    | Analisis                    | -KKA: peneliti              | Jenis data:               |                                  |
| (2006)    | Faktor-Faktor               | d <mark>ar</mark> i SPAP    | data primer               | -PI => (-) PTE                   |
| ,         | Yang                        | -Perilaku Tidak             | Sumber                    | diterima                         |
|           | Berpengaruh                 | Etis: Robinson              | data:                     | -PI=> (-)KKA                     |
|           | Terhadap                    | -Keefekti <mark>fa</mark> n | persepsi                  | diterima                         |
|           | Ke <mark>cenderun</mark> ga | PI:peneliti IAI             | Unit                      | -KK=> PTE                        |
|           | n Kecurangan                | -Kesesuaian                 | analisis:                 | ditolak                          |
|           | Akuntansi:                  | Kompensasi:                 | per <mark>usah</mark> aan | -KK=>KKA                         |
|           | Stu <mark>di P</mark> ada   | Gibson                      | BUMN                      | ditolak                          |
|           | Per <mark>usah</mark> aan   | -KAA: IAI                   | An <mark>alis</mark> is : | -KAA=>PTE                        |
|           | Publ <mark>ik d</mark> an   | -Asimetri                   | AMOS 4.0                  | diterima                         |
|           | Badan Usaha                 | Informasi: Dunk             |                           | -KAA => KKA                      |
|           | Milik Negara                | Moralitas                   |                           | diterima                         |
|           | Di Indonesia                | Manajemen:                  |                           | -AI=>PTE                         |
|           |                             | Kohlbergh &                 |                           | diterima                         |
|           |                             | Rest                        |                           | -AI=>KKA                         |
|           |                             |                             |                           | diterima                         |
|           |                             |                             |                           | -MM=>PTE                         |
|           |                             |                             |                           | diterima                         |
|           |                             |                             |                           | -MM=>KKA                         |
|           |                             |                             |                           | diterima                         |
| LINIIA    | /FRSITAS                    | NEGERI S                    | FMARA                     | -PTE=>KKA                        |
| ~=        |                             |                             |                           | diterima                         |
| Thoyibatu | Faktor-Faktor               | -Perilaku Tidak             | Jenis                     | -SPI=>PTE                        |
| n         | yang                        | Etis (PTE)                  | penelitian:s              | diterima                         |
| (2009)    | Berpengaruh                 | -Kecenderungan              | urvei                     | -SPI=>KKA                        |
|           | terhadap                    | Kecurangan                  | Unit                      | diterima                         |
|           | Perilaku                    |                             | analisis:                 |                                  |

| PENULIS    | JUDUL                       | VARIABEL  | METODE    | TEMUAN           |
|------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|
|            | Tidak Etis dan              | Akuntansi                                       | pejabat & | -Sistem          |
|            | Kecenderunga                | (KAA)   | semua     | kompensasi=>PT   |
|            | n Kecurangan                | -Kesesuaian                                     | pihak     | E diterima       |
|            | Akuntansi                   | Sistem  | terkait   | -Sitem           |
|            | serta akibatnya             | Pengendalian                                    | akuntansi | Kompensasi       |
|            | terhadap                    | Internal SPI)                                   |           | =>KKA diterima   |
|            | kinerja                     | -Sistem   |           | -KAA=>PTE        |
|            | org <mark>anisa</mark> si   | kompensasi (SK)                                 |           | diterima         |
| / /        |                             | -Kecenderungan                                  |           | -KAA=>KKA        |
|            |                             | Kecurangan                                      |           | diterima         |
|            |                             | Akuntansi                                       |           | -PTE             |
|            |                             | (KAA)   |           | =>KKAditerima    |
|            |                             | -Akuntabilitas                                  |           | -KKA => AK       |
|            |                             |   |           | ditolak          |
| Sulastri   | Fraud pada                  | -Keadilan                                       | Persamaan | -Keadilan        |
| dan        | Sektor                      | Kompensasi                                      | regresi   | kompensasi=>fra  |
| Simanjunt  | Pemerintah                  | -Sistem   |           | ud diterima      |
| ak         | Berdasarkan                 | P <mark>en</mark> genda <mark>li</mark> an      |           | -SPI=>fraud      |
| (2014)     | Faktor                      | I <mark>nte</mark> rnal                         |           | diterima         |
|            | Keadilan                    | - <mark>Et</mark> ika Or <mark>ganisas</mark> i |           | -etika           |
|            | Kompensasi,                 | P <mark>e</mark> merintah                       |           | organisasi=>frau |
|            | Sistem                      | -Fraud pada                                     |           | d ditolak        |
|            | Pengendalian                | S <mark>ek</mark> tor Publik                    |           |                  |
|            | Internal, Dan               |   |           |                  |
|            | Eti <mark>ka</mark>         |   |           |                  |
|            | Or <mark>gani</mark> sasi   | `   |           |                  |
|            | Pem <mark>erin</mark> tah   |   |           |                  |
|            | (Studi Empiris              |   |           |                  |
|            | Dinas                       |   |           |                  |
|            | Pemerintah                  |   |           |                  |
|            | Provinsi DKI                |   |           |                  |
|            | Jakarta)                    |   |           |                  |
| Sulistiyow | Pengaruh                    | -Kepuasan Gaji                                  | SPSS      | -Kepuasan        |
| ati        | Kepuasan Gaji               | -Kultur   |           | gaji=>korupsi    |
| (2007)     | dan Kultur                  | Organisasi                                      |           | ditolak          |
|            | Organisasi                  | -Persepsi tentang                               |           | -Kultur          |
|            | terhadap                    | Tindak Korupsi                                  |           | organisasi       |
|            | Persepsi                    |   |           | =>korupsi        |
| UNIV       | Aparatur $\top \triangle$ S | NEGERI S  | FMARA     | diterima         |
| 0.410      | Pemerintah                  |   |           |                  |
|            | Daerah                      |   |           |                  |
|            | Tentang                     |   |           |                  |
|            | Tindak                      |   |           |                  |
|            | Korupsi                     |   |           |                  |
|            |                             |   |           |                  |

| PENULIS   | JUDUL                       | VARIABEL                                      | METODE                   | TEMUAN                     |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Eliza     | Pengaruh                    | -Kecenderungan                                | Metode                   | -Moralitas                 |
| (2015)    | Moralitas                   | kecurangan                                    | pengumpula               | Individu =>KKA             |
|           | Individu dan                | akuntansi                                     | n data:                  | diterima                   |
|           | Pengendalian                | -Moralitas                                    | kuesioer                 | -Pengendalian              |
|           | Internal                    | Individu                                      | Metode                   | Internal => KKA            |
|           | terhad <mark>a</mark> p     | -Pengendalian                                 | an <mark>ali</mark> sis: | diterima                   |
|           | Kecenderunga Kecenderunga   | Internal                                      | regresi                  |                            |
|           | n K <mark>ecur</mark> angan |   | linear                   |                            |
| / /       | Akuntansi                   |   | berganda                 |                            |
|           | (Studi Empiris              |   |                          |                            |
|           | Pada SKPD di                |   |                          |                            |
|           | Kota Padang)                |   |                          |                            |
| Najahning | Faktor-faktor               | -Penegakan                                    | Analisis                 | -P <mark>H=&gt;K</mark> KA |
| rum       | yang                        | Peraturan (PP)                                | data: SEM                | diterima diterima          |
| (2013)    | mempengaruhi                | - <mark>Pe</mark> ngend <mark>ali</mark> an   | Alat                     | -KPI=>KKA                  |
|           | fraud: Persepsi             | Internal (PI)                                 | analisis:                | diterima /                 |
|           | pegawai dinas               | -Asimetri                                     | SmaPLS                   | -AI=>KKA                   |
|           | provini DIY                 | I <mark>nf</mark> ormas <mark>i (AI)</mark>   |                          | diterima                   |
|           |                             | - <mark>Ke</mark> adilan                      |                          |                            |
|           |                             | d <mark>ist</mark> ributi <mark>f (KD)</mark> |                          | -KD=>KKA                   |
|           |                             | - <mark>Ke</mark> adilan                      |                          | diterima                   |
|           |                             | p <mark>ro</mark> sedural (KP)                |                          | -KP=>KKA                   |
|           |                             | - <mark>Ko</mark> mitm <mark>en</mark>        |                          | diterima                   |
|           |                             | Organisasi (KO)                               |                          | -KO=>KA                    |
|           |                             | -Budaya Etis                                  |                          | diterima                   |
|           |                             | Organisasi                                    |                          | -BEO=>KKA                  |
|           |                             | (BEO)   |                          | ditolak                    |
|           |                             |   |                          |                            |

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

## 2.4 Kerangka Berpikir

# 2.4.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Accounting Fraud Tendency

Kesesuaian kompensasi berkaitan dengan unsur teori *fraud diamond* untuk elemen tekanan. Sulastri dan Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa keadilan dalam instansi pemerintah dapat dilihat berdasarkan kompensasi yang diterima pegawai, apabila kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pengetahuan dan

kemampuan yang diberikan maka akan memotivasi pegawai untuk berperilaku curang (*fraud*). Kompensasi dapat menentukan motivasi kerja seorang pegawai dalam kinerjanya karena berkaitan dengan kesejahteraan kehidupan pegawai. Jika pegawai merasa kompensasi yang diterima sesuai dan kesejahteraan terpenuhi maka kecenderungan untuk melakukan *accounting fraud tendency* kecil.

Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai diharapkan dapat mengurangi terjadinya accounting fraud tendency. Seseorang yang melakukan accounting fraud tendency dikarenakan perasaan bahwa adanya ketidaksesuaian antara kompensasi dengan kinerja, selain itu kompensasi yang didapat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja maka kemungkinan tindak kecurangan dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keadilan kompensasi terhadap accounting fraud tendency pada sektor pemerintah. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) yang menyatakan bahwa sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) yang menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency. Kompensasi yang diterima oleh pengelola keuangan desa telah sesuai maka kecenderungan tingkat accounting fraud tendency yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

## 2.4.2 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Accounting Fraud Tendency

Teori *fraud diamond* menjelaskan bahwa seseorang melakukan sebuah kecurangan karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Kesempatan dapat terjadi karena lemahnya pengendalian intern dari organisasi sehingga dapat memberikan celah untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk dapat meminimalisir tindakan kecurangan adalah dengan peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) sangat besar, sebaliknya jika pengendalian internal kuat maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diminimalisir (Hendri dan Firman, 2013).

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara dan peraturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Rae dan Subranabiam (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang berpotensi mencegah kesalahan dan penipuan melalui peningkatan dan pemantauan proses pelaporan keuangan organisasi serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang bersangkutan. Jika pengendalian intern yang ada di organisasi dapat berjalan dengan baik maka tujuan organisasi dapat tercapai dan menghindarkan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan. Pengendalian terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) menyatakan bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Eliza (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap accounting fraud tendency. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti dan Meiranto (2012) menunjukan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap accounting fraud tendency. Jika sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif maka accounting fraud tendency dapat ditekan, sebaliknya jika sistem pengendalian internal tidak efektif dan kurang jelas maka kemungkinan terjadinya tindakan accounting fraud tendency semakin besar.

## 2.4.3 Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Accounting Fraud Tendency

Budaya etis organisasi memproksikan elemen atau unsur pada *fraud diamond theory* berupa rasionalisasi. Budaya etis organisasi merupakan sikap dan tindakan yang ada pada diri pegawai yang dapat membentuk budaya organisasi dan menunjukan karakteristik kebiasan pada organisasi tersebut yang membentuk persepsi bagi setiap karyawan. Jika tindakan kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa dianggap budaya yang biasa dilakukan oleh pegawai lain, maka seorang pegawai akan menganggap tindakan yang dilakukan merupakan hal biasa.

Sulastri dan Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa apabila setiap individu dalam organisasi memiliki etika yang kuat maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan perusahaan seperti tindakan kecurangan (*fraud*). Seorang pegawai akan merasionalkan tindakan yang dilakukan bukan sebuah kecurangan. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik budaya etis yang ada dilingkungan pemerintah desa maka akan semakin rendah tingkat *acounting fraud tendency* yang mungkin terjadi pada sektor pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) menunjukan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* disektor pemerintah. Penelitian ini didukung dengan penelitian Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Hal ini menunjukan semakin baik budaya yang diterapkan oleh pemerintah desa maka dapat mengurangi terjadinya *accounting fraud tendency* di sektor pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap *acounting fraud tendency*.

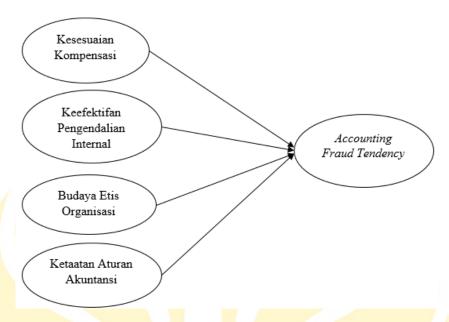
# 2.4.4 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Accounting Fraud Tendency

Teori *fraud diamond* menjelaskan bahwa kecurangan atau *fraud* tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi melainkan kemampuan seseorang. *Accounting fraud tendency* dapat terjadi karena kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah kecurangan. Ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan seorang akuntan terhadap prosedur dan standar yang ada. Wilopo (2006)

menjelaskan bahwa semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendah *accounting fraud tendency* yang dapat terjadi dalam perusahaan. Jika aturan akuntansi atau pengelolaan keuangan pada pemerintah desa tidak ditaati dengan baik, hal ini akan memberikan kesempatan atau peluang terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Thoyibatun (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor. Semakin pemerintah desa taat terhadap aturan akuntansi, semakin rendah *accounting fraud tendency* yang mungkin terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) menunjukan bahwa ketaatan dari akuntan atau penanggung jawab penyusun laporan keuangan terhadap aturan akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap accounting fraud tendency pada perusahaan. Penelitiam ini didukung hasil penelitian dari Thoyibatun (2012) serta Sari dan Adiputra (2015) yang menyatakan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap accounting fraud tendency. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti dan Meiranto (2012) menunjukan hasil yang berbeda yaitu ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap accounting fraud tendency. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan kerangka pemikiran penelitian mengenai keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya etis organisasi terhadap accounting fraud tendency



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penyusunan Peneliti

## 2.5 **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *accounting*fraud tendency
- H<sub>2</sub> : Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap

  \*\*accounting fraud tendency\*\*
- H<sub>3</sub> : Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *accounting*fraud tendency
- H<sub>4</sub> : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *accounting* fraud tendency

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya etis organisasi terhadap *accountig fraud tendency*. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap *accounting*fraud tendency, sehingga hipotesis H1 diterima
- 2. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap accounting fraud tendency, sehingga hipotesis H2 tidak diterima
- 3. Budaya et<mark>is organis</mark>asi tidak berpengaruh n<mark>ega</mark>tif terhadap *accounting fraud* tendency, sehingga hipotesis H3 diterima
- 4. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud tendency*, sehingga hipotesis H4 tidak diterima

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini merumuskan saran sebagai berikut:

 Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa indikator untuk keefektifan pengendalian internal di desa Kabupaten Grobogan berjalan dengan baik. Ketaatan aturan akuntansi pengelola keuangan desa juga menunjukan bahwa ketaatan pengelola keuangan desa baik. Diharapkan pengelola keuangan desa di Kabupaten Grobogan tetap dapat menjaga keefektifan pengendalian internal agar tetap berjalan dengan efektif dan menjunjung tinggi ketaatan aturan dalam mengelola keuangan.

- 2. Hasil analisis deskriptif kesesuaian kompensasi menunjukan bahwa kompensasi keuangan masuk dalam kategori cukup. Diharapkan pemerintah desa di Kabupaten Grobogan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan pengelola keuangan desa dengan memberikan kompensasi keuangan tidak hanya berupa penghasilan tetap melainkan jaminan sosial yang dapat berupa tunjangan, asuransi, dan liburan yang tidak hanya tergantung pada kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan. Pemberian kompensasi keuangan yang sesuai dapat membuat pengelola keuangan desa merasa puas dan nyaman dengan pekerjaannya, sehingga dapat meminimalisir tindakan accounting fraud tendency.
- 3. Pemerintah desa di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat membuat peraturan terkait budaya etis organisasi secara jelas dan spesifik. Hal ini dilakukan agar setiap pengelola keuangan desa dapat mengetahui peraturan etis dan menentukan perilaku yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sebagai seorang pengelola keuangan desa.
- 4. Penelitian ini memproksikan faktor-faktor yang mempengaruhi accounting fraud tendency berdasarkan fraud diamond theory. Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian tentang accounting

fraud tendency dengan menentukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi accounting fraud tendency selain dari fraud diamond theory, sehingga dapat digunakan untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Zakki. (2016). Korupsi Dana Desa Rp 52 Juta, Kades Tegalsumur Ditahan. <a href="http://berita.suaramerdeka.com/korupsi-dana-desa-rp-52-juta-kades-tegalsumur-ditahan/">http://berita.suaramerdeka.com/korupsi-dana-desa-rp-52-juta-kades-tegalsumur-ditahan/</a> (diakses tanggal 17 Maret 2017)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013.
- \_\_\_\_\_. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015.
- . (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.
- Cressy, D. R.,. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review, 15 (6), pp. 738-743, December, pp. 1-15. Retrieved from www.JSTOR.org
- Eliza, Yulina. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). Jurnal Akuntansi, Vol.4 No.1. Hal 86-100 Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang.
- Ferdinand, Augusty. (2014). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri, Susi, & Firman, Farid. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Latihan serta Kompetensi terhadap Implementasi SPIP Guna Mencegah Fraud. Jurnal Akuntansi, Vol 2, No.1, Oktober 2013: 84-100. Riau: Universitas Riau.
- Indonesia Corruption Watch. (2016). ICW Lansir Data Korupsi di Desa. <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/icw-lansir-data-korupsi-di-desa">http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/icw-lansir-data-korupsi-di-desa</a> (Di akses tanggal 13 Febuari 2017)
- Infokorupsi. (2014). Korupsi di Kabupaten Grobogan. <a href="http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11996&l=korupsi-rp-60-juta-mantan-kades-divonis-1-tahun-penjara">http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11996&l=korupsi-rp-60-juta-mantan-kades-divonis-1-tahun-penjara</a> (Diakses tanggal 7 Januari 2017 pukul 19.00)

- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irianto, G., Novianti, N., Rosalina, K., & Firmanto, Y. (2012). *Integrity, Unethical Behavior, and Tendency of Fraud. Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 16 No.2 Juni 2012: 144-163. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa. <a href="https://www.djpk.depkeu.go.id">https://www.djpk.depkeu.go.id</a> (di unduh pada tanggal 17 Maret 2017)
- KPK. (2015). KPK temukan 14 potensi persoalan pengelolaan dana desa. <a href="https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa">https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa</a> (Diakses pada tanggal 13 Febuari 2017)
- Kusumastuti, Nur.R., & Meiranto, Wahyu. (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1 No. 1. Hal 1-15 Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kyalo, Shandrack., Kalio, Aquilars., & Ngahu, Solomon. (2014). Role of Fraud Prevention in Enhancing Effective Financial Reporting in County Governments in Kenya: Case of Nakuru County, Kenya. International Journal of Science and Research, Volume 3 Issue 10 October 2014 Kenya: JKUAT.
- Lou, Yung., & Wang, Ming. (2009). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. Journal of Business & Economics Research, Vol.7 No.2. Taiwan: Nan Hua University
- Lubis, Arfan. (2014). Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat
- Mustikasari, Dhermawati. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Accounting Analysis Journal 2 (3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Najahningrum, Anik. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal 2(3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Noviyanti, Nur., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal 5 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurjanah. (2008). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Departemen Pertanian). *Disertasi*. Semarang: UNDIP.

- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2017). Peta Wilayah Kabupaten Grobogan. www.grobogan.go.id (di akses pada 15 Maret 2017)
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturang Daera<mark>h K</mark>ab<mark>up</mark>aten Gr<mark>o</mark>bogan <mark>Nomor 7 Tahun 2</mark>016 tentang Perangkat Desa.
- Polycarpus, Rudi. (2016). Pemerintah Daerah Jadi Episentrum Kasus Korupsi.http://www.mediaindonesia.com/news/read/63966/pemerintah-daerah-jadi-episentrum-kasus-korupsi/2016-08-29. (Diakses pada 17 Maret 2017)
- Pradnyani, Ni Luh Putu. (2014). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana
- Pristiyanti, Ika. (2012) .Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Accounting Analysis Journal 1 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Pusdiklatwas BPKP. (2014). *Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Pengendalian Intern. Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil/ahli dan Penjenjangan Auditor Muda.* Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Rae, Kristy., & Subranabiam, Nava. (2008). Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organisational Justice

- and Employee Fraud. Managerial Auditing Journal, Vol. 23 Iss 2 pp. 104-124. Australia: Griffith University
- Robbins, S., & Judge, T.. (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, N., Yuniarta, G., & Adiputra, I. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). e-Journal S1 Ak, Volume 3 NO.1. Buleleng: Universitas Pendidikan Ganesha
- Sarj<mark>on</mark>o, H., & Julianita, W.. (2013). SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulastri, & Simanjuntak, B. (2014). Fraud Pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah.e-Journal Magister Akuntansi Trisakti, Volume 1 No. 2. Hal 199-227 Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sulistiyowati, Firma. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah daerah Tentang Tindak Korupsi. JAAI Volume 11 No.1 Hal 44-66. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Thoyibatun, Siti. (2009). Analysing The Influence of Internal Control Compliance and Compensation System Against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tedency (Studies at State University in east Java). Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang.
- Thoyibatun, Siti. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 16 No.2 Hal 245-260 Malang: Universitas Malang.
- Tuanakotta, Theodorus, M. (2014). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wagiran. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyudin, Agus. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Pendidikan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Wibowo. (2007). Manajemen Kerja. Jakarta: PT Rajagrafindo persada
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Wolfe, David T. Dan R. Hermanson. (2004). "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud". Dalam The CPA Journal
- Wright, P. M. 2003. Restoring trust: The role of HR in corporate governance (CAHRS Working Paper #03-11). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/34
- Zimbelman, M., Albrecht, C., Steve, W., & Chad. (2014). Akuntansi Forensik.

  Jakarta: Salemba Empat.

